

Analisis Pengaruh Profitabilitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta

¹Nur Muntinah

¹Universitas Widya Mataram

E-mail: mutinah@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Profitability, Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) and Regional Original Income (PAD)</p>	<p><i>This research was conducted to determine the influence analysis of the profitability of Perumda BPR Bank Jogja on Local Revenue (PAD) of Yogyakarta City Government based on Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). The type of data used is quantitative data, sourced from secondary data obtained through documentation. The results showed that the Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) of Perumda BPR Bank Jogja experienced fluctuations during 2017 – 2021 with a very sharp decline occurring in 2020 so that the contribution from the profitability or profits of Perumda BPR Bank Jogja to Regional Original Income not maximal yet. Based on the results of the hypothesis testing that has been done, it shows that individually (partially) the Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) of Perumda BPR Bank Jogja has no significant effect on Regional Original Income (PAD). Meanwhile, together the Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) of Perumda BPR Bank Jogja have an effect on the Yogyakarta City Government's Local Original Income (PAD).</i></p>

Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Profitabilitas, Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	<p>Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis pengaruh profitabilitas Perumda BPR Bank Jogja terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) Perumda BPR Bank Jogja mengalami fluktuasi selama tahun 2017 – 2021 dengan penurunan sangat tajam terjadi pada tahun 2020 sehingga kontribusi dari profitabilitas atau laba Perumda BPR Bank Jogja terhadap Pendapatan Asli Daerah belum bisa maksimal. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara individu (parsial) Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) Perumda BPR Bank Jogja tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan secara bersama-sama Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) Perumda BPR Bank Jogja berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta.</p>

1. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah di Indonesia bersifat otonom sehingga mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati.

Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Putra, 2016). Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemandirian suatu daerah. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya, dimana Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom.

Kemampuan suatu daerah menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri tidak hanya dituntut untuk melihat peluang potensi yang sudah ada namun juga kemampuan suatu daerah dalam membangun potensi yang baru. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satunya adalah usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah berjalan sejak lama (Putra, 2016).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan pajak restribusi. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang didirikan seluruhnya atau sebagian, dengan modal daerah. Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah (Putra, 2016). Selain itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah, setelah dikurangi dengan penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diyakini dapat memberikan berbagai manfaat yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat ekonomi di daerah, dimana tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah.

Kegiatan perusahaan sudah dapat dipastikan berorientasi pada keuntungan atau laba (Nafarin, 2007). Laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan laba sejauh mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses penjualan selama periode tertentu. Laba yang diperoleh oleh perusahaan dapat dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu laba kotor dan laba bersih. Dimana laba kotor dapat diartikan sebagai berikut: laba kotor adalah perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan, sedangkan pengertian dari laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain (Supriyono, 2002). Profitisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba serta memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah yaitu dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Melakukan proses penyehatan perusahaan secara menyeluruh dengan meningkatkan kompetensi manajemen dan kualitas Sumber Daya Manusia.
- b. Mengarahkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk dapat berbisnis secara terfokus dan terspesialisasi dengan pengelolaan yang bersih, transparan dan profesional.
- c. Bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang misi utama untuk pelayanan publik dan pelayanan sosial, diberikan sasaran kuantitatif dan kualitatif tertentu.
- d. Memberdayakan Direksi dan Badan Pengawas yang dipilih dan bekerja berdasarkan profesionalisme melalui proses fit and proper test.
- e. Merumuskan kebijakan yang diarahkan kepada tarif yang wajar, kenaikan harga produk (minimal menyesuaikan dengan inflasi, tarif listrik, BBM, dan lain-lain) untuk menghindarkan biaya produksi yang jauh lebih mahal, sehingga laba dapat diraih.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di Kota Yogyakarta antara lain: Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta dan XT Square. Dari ketiga BUMD tersebut, peneliti memilih Perumda BPR Bank Jogja sebagai obyek penelitian.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Yogyakarta dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta, dan telah diterbitkan Peraturan Daerah terbaru yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja, Perumda BPR Bank Jogja dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas. Perumda BPR Bank Joga didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah. Selain itu dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Pasal 3 menjelaskan salah satu tujuan Perumda BPR Bank Jogja memperoleh laba atau keuntungan.

2. KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan dibandingkan satu dengan lainnya (Priatna, 2016).

Rasio profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya (Sanjaya dan Rizky, 2018). Efektifitas disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Kebijakan yang diambil perusahaan dalam menentukan laba dapat dilihat dari tingkat profitabilitasnya.

Profitabilitas dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan dalam menggunakan modal kerja secara efektif dan efisien untuk menghasilkan tingkat laba tertentu yang diharapkan. Bagi perusahaan pada umumnya masalah profitabilitas sangat penting daripada laba, karena laba yang besar dapat memastikan bahwa perusahaan tersebut telah bekerja dengan efisien. Dengan demikian yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah tidak hanya bagaimana usaha untuk memperbesar laba, namun yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan profitabilitas (Sanjaya dan Rizky, 2018).

Menurut Suroyo dan Purba (2016) rentabilitas (profitability ratio) merupakan pengukuran kemampuan dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset atau modal perusahaan. Sedangkan Menurut Kasmir (2011) yang menyatakan bahwa “rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

Menurut Fahmi (2015), jenis-jenis rasio profitabilitas yang digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terdiri dari 4 (empat) yaitu Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), dan Return on Equity (ROE).

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari

hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa: "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Menurut Nurcholis (2007) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Sedangkan menurut Warsito dalam Windhu (2008) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Putra, 2008).

Dari semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan atau pemasukan pendapatan yang diterima suatu daerah yang dimana pendapatan tersebut berasal dari sumber-sumber yang ada di dalam wilayahnya sendiri yang dimana dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. (Rumende, dkk., 2019). Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga di dukung adanya UMKM mempertimbangkan pentingnya kesuksesan perusahaan, disamping itu komunikasi juga secara intens dilakukan misalnya ketika pemberitahuan adanya perkembangan baru maupun apabila terjadi masalah dalam pengiriman barang (Cahya, 2021).

C. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Potensi pendapatan asli daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Halim, 2014). Analisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan untuk memetakan potensi yang dimiliki oleh daerah yang nantinya akan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Pemerintah daerah yang memiliki proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dalam pendapatan daerahnya diharapkan mampu mengelolanya secara optimal untuk membiayai pembangunan daerah dan menyediakan pelayanan publik untuk masyarakatnya (Kusumayanti dan Triaryati, 2018).

Menganalisa potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan pengetahuan tentang beberapa variabel yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan yaitu: kondisi awal daerah, peningkatan cakupan, perkembangan PDRB perkapita Riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan baru, sumber pendapatan baru dan perubahan peraturan (Halim, 2014).

D. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, mau tidak mau peranan PAD harus ditingkatkan, karena merupakan salah satu tolak ukur kemampuan dan cerminan kemandirian daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Putra, 2008).

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik bila didukung oleh dana yang memadai, di samping dana dari pusat. Namun demikian, meskipun terdapat bantuan transfer dana dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat, dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang berpotensi harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putra, 2008).

Upaya optimalisasi PAD yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut (Putra, 2008):

1. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai perkembangan harga dan tingkat inflasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyak sekali tarif pajak daerah tersebut telah ditetapkan sejak lama dan tidak pernah dirubah. Akibatnya penetapan tarif tersebut terlalu rendah dibandingkan dengan perkembangan harga.
2. Penetapan tarif pajak baru sesuai dengan undang-undang yang berlaku terhadap beberapa potensi wajib pajak baru yang ada di daerah yang bersangkutan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PAD dengan melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan objek pajak tertentu.
4. Menciptakan lingkungan dan iklim yang kondusif bagi pengembangan investasi dan perekonomian kota serta memfasilitasi investor domestik dan asing bagi pelaksanaan investasi di daerah.
5. Meningkatkan system insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dalam mengelola pendapatan yang dilakukan. f. Intensifikasi merupakan cara yang dilakukan dari dalam untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah dengan memperbaiki kualitas pelayanan dan prosedur keuangan yang baik sebagai bentuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas organisasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

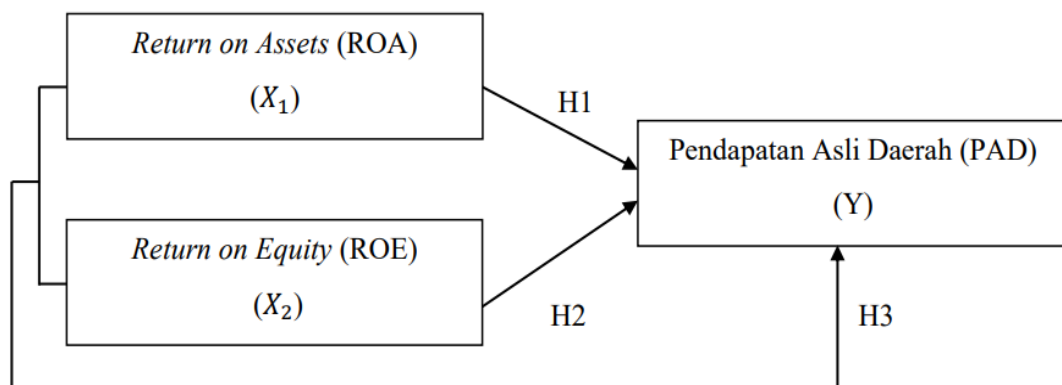
6. Ekstensifikasi ini dilakukan dengan cara menggali sumber pendapatan daerah Ekstensifikasi dimaksud dengan usaha maupun dalam bentuk penambahan jumlah objek pajak yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah.

Upaya-upaya ini dapat dilakukan sekaligus guna lebih memaksimalkan peningkatan penerimaan PAD pada daerah yang bersangkutan. Selain itu, dalam upaya meningkatkan PAD yang maksimal juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Artinya optimalisasi PAD tidak hanya memfokuskan beberapa aspek, misalnya pajak dan retribusi yang justru kemudian berdampak pada beban kesanggupan masyarakat. Alih-alih meningkatkan kualitas pelayanan publik, pajak dan retribusi yang dipungut justru menimbulkan beban yang baru (Putra, 2008).

E. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Diduga Return on Assets (ROA) Perumda BPR Bank Jogja berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta.
- H2 : Diduga Return on Equity (ROE) Perumda BPR Bank Jogja berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta.
- H3 : Diduga Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta.



3. METODE PENELITIAN

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik dokumentasi yaitu dokumenter yang diambil dari Perumda BPR Bank Jogja berupa laporan keuangan (annual report) periode 2017-2021 dan dari BPKAD Kota Yogyakarta melalui Bappeda DIY berupa Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Kota Yogyakarta periode 2017-2021. Dimana teknik ini dilakukan berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.

B. Variabel-variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini terdapat dua macam variabel, yaitu variabel terikat (variabel dependen) dan variabel bebas (variabel independen).

C. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan atau pemasukan pendapatan yang diterima suatu daerah yang dimana pendapatan tersebut berasal dari sumber-sumber yang ada di dalam wilayahnya sendiri yang dimana dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini ada 2 (dua) variabel yang menjadi variabel independen adalah sebagai berikut:

1. Return on Asset (ROA)

Menurut Hanafi dan Halim (2012), Return on Asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Return on Asset (ROA) menurut Kasmir (2016) adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Menurut Fahmi (2015) Return on Asset sering juga disebut sebagai return on investment, karena ROA ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.

2. Return on Equity (ROE)

Menurut Hanafi dan Halim (2012), Return on Equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal saham tertentu. Menurut Kasmir (2016), Return on Equity adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ROE dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi nilai ROE, maka semakin baik, itu mengindikasikan bahwa posisi perusahaan akan terlihat semakin kuat, begitu pun sebaliknya.

E. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018), Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dalam residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara yang dapat dilakukan dalam penelitian guna tahu terdapat tidaknya heteroscedasticity di model regresi linier berganda ialah menggunakan Rank-Spearman. Yang mendasari dalam pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas dengan rank spearman yakni:

1. Jika angka Sig. (2-tailed) $> 0,05$ hingga model regresi yang dipakai di studi layak untuk dilakukan ataupun tidak ada heteroskedastisitas.
2. Jika Sig. (2-tailed) $< 0,05$ hingga bisa diasumsikan terdapat persoalan heteroskedastisitas dan model regression belum layak dimanfaatkan.

F. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Dijelaskan juga bahwa jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (D-W). Widjarjono (2010) mengemukakan, pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut:

1. Bila D-W terletak antara batas atas (du) dan ($4-du$), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berrarti ada autokorelasi
2. Bila nilai D-W lebih rendah daripada batas bawah (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai D-W lebih besar daripada ($4-dl$), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai D-W terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau D-W terletak diantara ($4-du$) dan ($4-dl$), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

G. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Untuk melakukan pengujian regresi linear berganda, penulis menggunakan bantuan program SPSS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah pembahasan tentang pengaruh profitabilitas Perumda BPR Bank Jogja terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta:

- a. Nilai Return on Assets (ROA) Perumda BPR Bank Jogja selama tahun 2017 – 2021 mengalami fluktuasi dimana mengalami kenaikan pada tahun 2017-2019

dan mengalami penurunan sangat tajam pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,45% dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,59%. Selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 1,86%. Hal ini disebabkan diantaranya karena terjadinya pandemi virus corona dan kurangnya kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan penjualan sehingga laba yang dihasilkan menurun. Hal ini berarti Perumda BPR Bank Joga belum memanfaatkan aset-asetnya dengan baik sehingga belum bisa memberikan kontribusi laba secara maksimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta.

- b. Nilai Return on Equity (ROE) Perumda BPR Bank Jogja selama tahun 2017 – 2021 mengalami fluktuasi dimana mengalami penurunan pada tahun 2017 – 2018, selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan sangat tajam pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,25% dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu 14,32%. Dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 7,63%. Hal ini disebabkan karena Perumda BPR Bank Jogja belum mampu memaksimalkan ekuitasnya dengan baik untuk menghasilkan laba yang lebih besar dari sebelumnya dan karena adanya pandemi virus corona. Hal ini berarti kontribusi laba yang diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta belum bisa maksimal.
- c. Berdasarkan Uji Hipotesis dengan Uji t dan Uji F diperoleh hasil sebagai berikut:

Uji t diperoleh hasil signifikansi ROA sebesar 0,385 dan ROE sebesar 0,722 yang berarti kedua variabel tersebut tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) Perumda BPR Bank Jogja secara individu (parsial) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan berdasarkan hasil Uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,050, yang berarti dapat digunakan untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau menunjukkan bahwa Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) Perumda BPR Bank Jogja secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta.
- d. Berdasarkan hasil penelitian ini, mendukung hasil penelitian terdahulu yaitu : Bayu Pratama Putra (2016). Fakultas Ekonomi Universitas Maritime Raja Ali Haji Tanjung Pinang Kep. Riau, judul Analisis Kontribusi Laba Perusahaan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjung Pinang Periode 2010 – 2015. Hasilnya bahwa BUMD memiliki kontribusi terhadap PAD di Tanjung Pinang dimana setiap tahunnya bersifat fluktuatif di tahun 2010 – 2015.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) Perumda BPR Bank Jogja mengalami fluktuasi selama tahun 2017 – 2021 dengan penurunan sangat tajam

terjadi pada tahun 2020 sehingga kontribusi dari profitabilitas atau laba Perumda BPR Bank Jogja terhadap Pendapatan Asli Daerah belum bisa maksimal. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara individu (parsial) Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) Perumda BPR Bank Jogja tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan secara bersama-sama Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) Perumda BPR Bank Jogja berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan adanya sebuah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan dalam sumber-sumber penerimaan daerah baik secara ekstensifikasi dan intensifikasi agar peningkatan penerimaan daerah yang telah ditargetkan sebelumnya dapat tercapai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta. Selain itu diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengelola BUMD agar profitabilitas atau kontribusi laba terhadap PAD dapat meningkat di masa yang akan datang.
2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya ataupun penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambah variabel bebas lainnya sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Reni, 2017. Analisis Kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Periode 2011 – 2015. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya.
- Antika, Ike Juni, 2017. Analisis Kontribusi BUMD Terhadap Peningkatan PAD di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Tahun 2006 – 2015. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Raden Intan Lampung.
- Cahya, 2021. Analisis Pengaruh Share Value, Komunikasi Terhadap Kepercayaan Dan Komitmen.
- Darwin. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Erdah Litriani dan Rudi Aryanto, 2015. Modul Panduan Praktikum SPSS.
- Fahmi, Irham, 2015. Analisa Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam, 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 9. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gusfahmi. 2007. Pajak Menurut Syari'ah. Jakarta: PT. Grafindo Pustaka.
- Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Bunga Rampat.

- Hanafi, Mahduh dan Abdul Halim, 2012. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: (UPP) STIM YKPN.
- Isa, Muzakar dan Abu Bakar Akbar, 2012. Pengukuran Efisiensi BUMD: Studi Empirik PDAM di Eks-Karisidenan Surakarta. *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol.16 No.1.
- Kasmir, 2016. Analisa Laporan Keuangan cetakan ke 9 2016 cetakan ke 10 2017, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusumayanti, Ni Putu Ari dan Nyoman Triaryati. 2018. Analisis Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten di Bali di Luar Wilayah Sarbagita. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.7, No. 8.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Muhtarom, Abid. 2015. Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010 – 2015. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Islam Lamongan, Vol.13 No.1.
- Muryanto, Yudho Taruno dan Djuwityastuti, 2014. Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3, No. 1.
- Nurcholis, Hanif, 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Putra, Bayu Pratama, 2016. Analisis Kontribusi Laba Perusahaan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang Periode 2010-2015. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Maritime Raja Ali Haji, Tanjung Pinang Kep.Riau.
- Rumende, Heince Jusva, dkk., 2019. Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi di PT. Bank Sulutgo). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Sulawesi Utara. Vol.20 No.1
- Sanjaya, Surya dan M. Fajri Rizky, 2018. Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Perrsero) Medan. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Vol.2, No.2.
- Sugiyono, 2015. Statistik untuk Pendidikan, Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, Elvan, 2019. Analisis Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Agama Negeri Raden Intan Lampung.
- Sujarweni, Wiratna, 2015. Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, Yogyakarta: Pustaka.
- Suroyo, Djahotman Purba. 2016. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.

- Tarumasely, Sari dan Susi Siswati, 2021. Analisis Rasio Profitabilitas Pada PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten Berdasarkan Operating Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Asset dan Return on Equity. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Immanuel. Vol.XV, No.1.
- Widjarjono, 2010. Analisis Statistika Multivariat Terapan, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Windhu Putra. 2008. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: PT. Raja Grafindo Persada).
- Yani, Ahmad, 2013. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.